

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perekonomian, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi kurang sejahtera dalam memenuhi standar hidup yang layak baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Di sisi lain kemiskinan berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, apabila seseorang tidak bekerja dan berpendapatan rendah maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin (Annur, 2013). Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak tidak bisa lepas dari masalah ini. Dengan angka kemiskinan yang semakin bertambah, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Di Kabupaten Boyolali sendiri telah berjalan program pemerintah diantaranya dengan adanya dana desa, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sesuai dengan arahan presiden pengentasan kemiskinan dimulai dari lingkup paling bawah dengan memperkuat wilayah yaitu pembangunan desa. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah melakukan kebijakan desentralisasi fiskal dengan penyaluran dana kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan penuh dalam hal urusan dan pengelolaan keuangan yang diperuntukkan untuk pembangunan desa (Yanuar et al., 2021)

Dana desa menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa. Dana

desa dialokasikan dengan memperhatikan kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, luas daerah, serta dari indeks kesulitan geografis. Tujuan dari dana desa secara umum adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Secara administratif Kabupaten Boyolali terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan terdiri dari 22 kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.006.409 jiwa dengan mayoritas berprofesi di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, dana desa yang disalurkan terbagi ke dalam 261 desa di 22 kecamatan dengan rincian yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah.

Kebijakan pemerintah yang lain untuk meminimalisir angka kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin yang sudah dimulai dari tahun 2007 dan berlangsung hingga saat ini dengan sasaran kepada keluarga penerima manfaat. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya tercatat di data terpadu program penanganan fakir miskin melalui komponen kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial (Beni, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, membantu meringankan biaya pengeluaran, menambah pendapatan rumah tangga, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas sehingga

rantai kemiskinan bisa diminimalisir dari waktu ke waktu (Puntorini & Purnomo, 2020). Program Keluarga harapan (PKH) didistribusikan dalam empat tahap dalam satu tahun berupa bantuan tunai dan kebutuhan makanan pokok melalui pendamping dari desa, kecamatan dan kabupaten dengan koordinator dari dinas sosial di wilayah setempat.

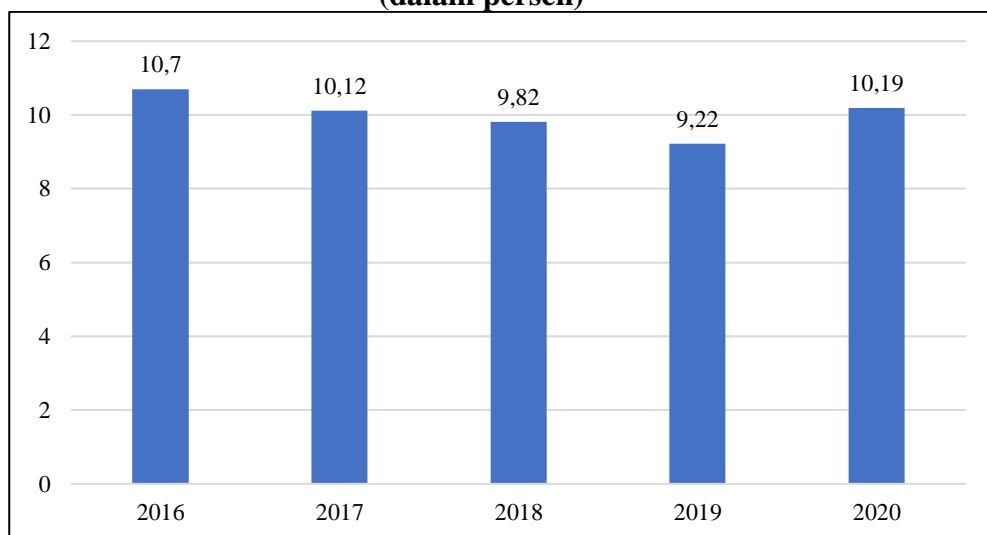
Dalam prakteknya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) belum tepat sasaran karena masih banyak dijumpai data yang belum diperbaharui. Ada beberapa peserta yang dapat dikategorikan mampu tetapi mendapat bantuan ini sebaliknya keluarga yang kurang mampu justru tidak terdaftar. Untuk itu perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah setempat dengan mengecek langsung kondisi di lapangan sehingga program ini bisa sesuai dengan peserta yang memenuhi persyaratan (Sasmito & Nawangsari, 2019).

Di bidang pendidikan pemerintah melalui kemendikbud membuat kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan cara pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini diluncurkan karena masih banyaknya angka siswa putus sekolah di usia sekolah akibat kendala biaya. Tujuan dari kartu ini untuk membantu siswa mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri diberikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK dengan besaran biaya yang disesuaikan dengan banyaknya siswa kurang mampu di dalam sekolah. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah dan uang saku siswa (Rohaeni, 2018).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) mempunyai harapan yang begitu besar terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menjangkau pendidikan seluas-luasnya baik di desa maupun kota tanpa mengenal waktu dan usia sehingga di masa yang akan datang dapat menciptakan sumberdaya manusia yang berkompeten dan terampil (Nikmah et al., 2020). Dengan adanya kebijakan program pemerintah diberbagai sektor diharapkan masalah kemiskinan bisa teratasi sepenuhnya.

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum, pada tahun 2016-2020 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari sisi persentasenya, terkecuali pada tahun 2020 persentase kemiskinan mengalami kenaikan.

**Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2020 (dalam persen)**

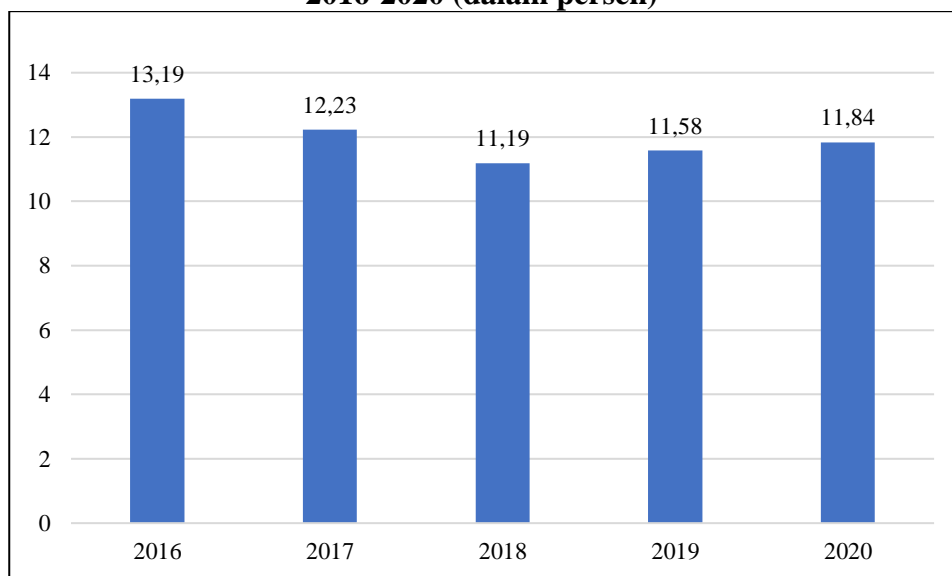


Sumber: BPS diolah

Dari Gambar 1.1 menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Indonesia periode 2016-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2016-2017 presentase penduduk miskin cenderung menurun dari

10,7 % di tahun 2016 menjadi 10,12 % di tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali turun menjadi 9,82 %, kondisi ini terus berlangsung sampai dengan tahun 2019 menjadi 9,22 %, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,19 % dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

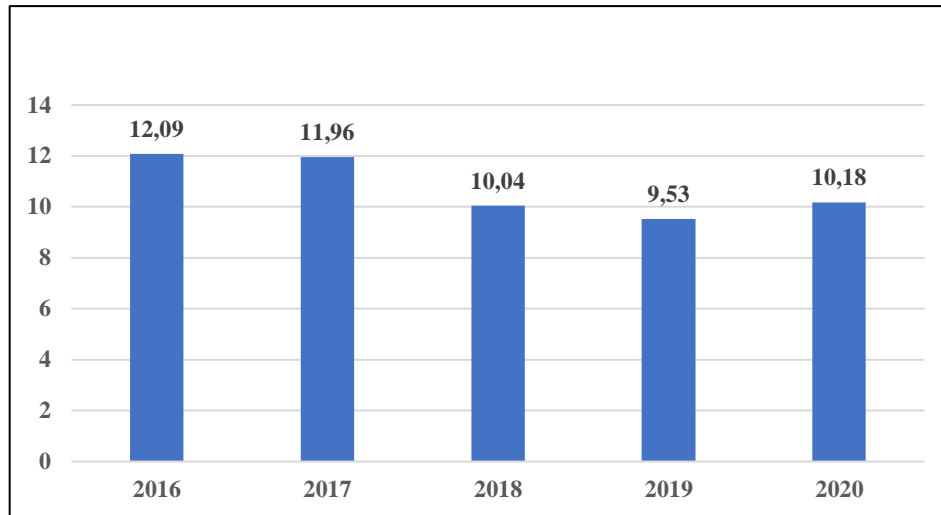
**Gambar 1. 2 Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (dalam persen)**



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah diolah

Dari Gambar 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2016-2018 presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, namun dilihat jumlah pertahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,19 % dan menurun menjadi 12,23 % di tahun 2017, kemudian berlangsung hingga tahun 2018 menjadi 11,19 %, pada tahun 2019 presentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 11,58 % dan bertambah menjadi 11,84 % pada tahun 2020.

**Gambar 1. 3 Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (dalam persen)**



Sumber: BPS Kab. Boyolali diolah

Gambar 1.3 menunjukkan presentase penduduk miskin di Kabupaten Boyolali periode tahun 2016-2020. Selama 5 tahun terakhir rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 sebesar 12,09 % dilihat dari presentasinya, kemudian turun di tahun 2017 menjadi 11,96 %, dan berlangsung hingga tahun 2019 menjadi 9,53 %. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 10,18 %.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat beberapa kebijakan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 3 tahun dengan menggunakan data panel pada 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali, sehingga diharapkan dapat menemukan hubungan antara program pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan wilayah Kabupaten Boyolali dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Secara ringkas penelitian ini dilakukan dengan judul

“Analisis Pengaruh Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kecamatan-Kecamatan di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2020)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana pengaruh Kartu Indonsia Pintar (KIP) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.
2. Menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.
3. Menganalisis pengaruh Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kecamatan di masing-masing wilayah Kabupaten Boyolali, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dengan tujuan untuk mengevaluasi program kemiskinannya agar ke depan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

2. Bagi Dinas Sosial, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi apakah program keluarga harapan tersebut sudah tepat sasaran dengan mengecek langsung kondisi di lapangan.
3. Bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membenahan Kartu Indonesia Pintar terutama lebih selektif dalam proses penyaluran sehingga kartu itu benar-benar diterima bagi siswa kurang mampu.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi bagi mereka yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan dengan program dana desa, program keluarga harapan dan kartu Indonesia pintar terhadap kemiskinan di Kabupaten Boyolali maupun di daerah lain.

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Alat dan Model Penelitian**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel pada 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali dalam rentang waktu 3 tahun sehingga model ekonometrika dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log DD_{it} + \beta_2 \log PKH_{it} + \beta_3 \log KIP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

<i>POV</i>	: Kemiskinan (%)
<i>DD</i>	: Dana Desa (rupiah)
<i>PKH</i>	: Program Keluarga Harapan (rupiah)
<i>KIP</i>	: Kartu Indonesia Pintar (rupiah)
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien regresi variabel independen
$\varepsilon$	: <i>Error Term</i> (faktor kesalahan)
<i>i</i>	: Kecamatan ke- <i>i</i> ( <i>cross section</i> )
<i>t</i>	: Tahun ( <i>time series</i> )
<i>log</i>	: Operator logaritma



## **E.2. Data dan Sumber**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Desa, data Program Keluarga Harapan (PKH), data Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan data presentase kemiskinan dengan rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi tentang tinjauan teori yang relevan dengan penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis masalah dalam penelitian, menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, menggambarkan kerangka teori, serta menetapkan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi daerah penelitian, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel dependen, analisis data, dan interpretasi hasil analisis data.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**